

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2017 dan 2016 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.14.206.067.082,00** atau mencapai **87,01%** dari pagu anggaran **Rp.16.326.055.884,47**.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2017 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.4.136.080.900,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.18.297.237,00** Aset Tetap sebesar **Rp.4.088.343.663,00** Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp.29.440.000,00**

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.14.450.034895,00**.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.0,00** dan Beban Operasi sebesar **Rp.15.240.942.723,00**

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.3.890.669.087,00**

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, ekuitas dana diakui aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016)
23. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42)
25. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 23)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2017 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp. ,00** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-
	- Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-
2	Belanja Operasi	
	- Belanja Pegawai	12.568.242.884,87
	- Belanja Barang dan Jasa	3.634.678.800,00
3	Belanja Modal	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.854.200,00
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
	- Belanja Modal Aset Lainnya	7.280.000,00
	JUMLAH	16.326.055.884,87

Realisasi pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran	Rasio
1	Pendapatan Asli Daerah			
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-
	- Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-
2	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	12.568.242.884,87	11.010.100.148,00	87,60
	- Belanja Barang dan Jasa	3.634.678.800,00	3.084.441.434,00	84,86
3	Belanja Modal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.854.200,00	105.735.500,00	91,27
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
	- Belanja Modal Aset Lainnya	7.280.000,00	5.790.000,00	79,53
	JUMLAH	16.326.055.884,87	14.206.067.082,00	87,01

2.2

Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basis kas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

3.3.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

3.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

3. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.

3.3.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

3.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Terkait dengan Peraturan tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Pengakuan

Pengakuan Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan aset. Artinya adalah pada waktu persediaan diterima, maka pada saat itu dilakukan pencatatan awal persediaan sebagai akun neraca.

Beban persediaan diakui sejumlah pemakaian persediaan yang dilakukan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) pada akhir periode dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan batasan kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

3. Penyusutan

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menerapkan penyusutan aset dimana metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
2. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
3. Pengesahan DPA/DPPA SOPD;
4. Pengendalian pelaksanaan APBD;
5. Pemberian petunjuk Teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran Kas Daerah;
6. Penetapan SPD;
7. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas Nama Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
9. Penyajian Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan Kebijakan dan Pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah;
11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
12. Pelaksanaan Tugas Lainnya Berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Oleh Bupati.

5.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya

Visi :

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka cara pandang ke depan organisasi ini harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif maka gambaran kedepan yang diinginkan, adalah sebagaimana dalam pernyataan visi sebagai berikut ini :

“ Mewujudkan Fungsi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Dengan indikator :

- 1. Tertib pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan didasari prinsip tata kelola yang baik, yaitu : efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.*
- 2. Penggalan, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan penerimaan daerah didasari aspek keadilan.*

Didalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya untuk memposisikan diri sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang melayani kepentingan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan menjadi pelopor penyelenggaraan kebijakan keuangan sesuai kewenangan yang diberikan secara proporsional atas kepedulian terhadap kondisi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

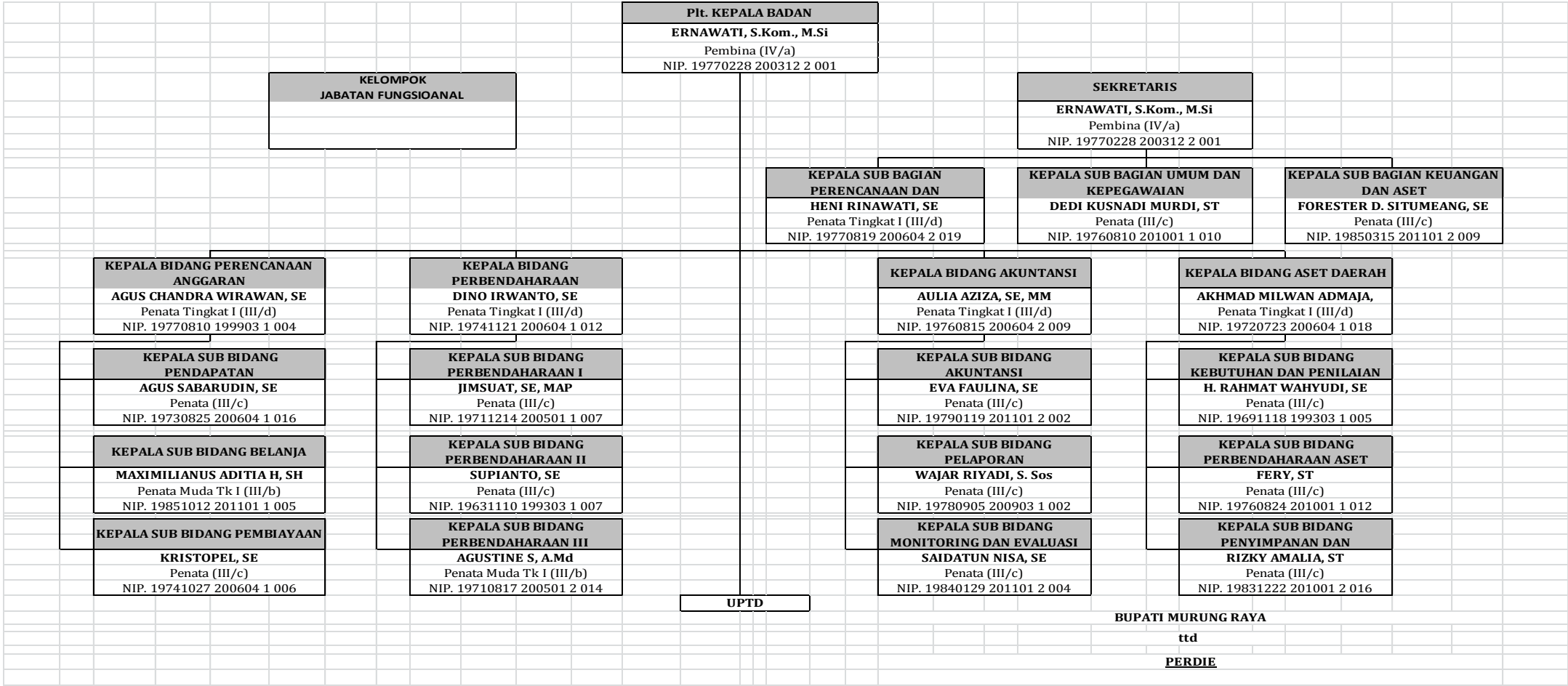
Misi :

Agar visi yang ditetapkan dapat secara bertahap diterapkan, maka perumusan pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting bagi operasionalisasi atau harus dilaksanakan.

Adapun Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya yang harus dilaksanakan dan harus diketahui semua pihak akan keberadaan dari unit organisasi ini, adalah sebagai berikut ini :

1. Melaksanakan fungsi tatakelola keuangan daerah.
2. Melaksanakan pungutan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan tatakelola aset/barang milik daerah.

5.1.3.Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Murung Raya



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu , Februari 2018

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

ERNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP.19770228 200312 2 001

BAB IV PENJELASAN POS -POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyediakan informasi mengenai realisasidan Belanja pada Tahun Anggaran 2017 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

1. 1. BELANJA OPERASI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Pegawai	12.568.242.884,87	11.010.100.148,00	87,60	8.979.539.251,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.634.678.800,00	3.084.441.434,00	84,86	5.744.375.867,00
	JUMLAH	16.202.921.684,87	14.094.541.582,00	86,99	14.723.915.118,00

1. 1. 1. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan</i>				
	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.321.673.788,00	1.613.923.820,00	72,30	1.678.673.640,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	195.473.229,00	124.805.296,00	69,98	136.791.722,00
	Belanja Tunjangan Jabatan	218.552.182,00	180.785.000,00	87,33	190.865.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	-	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras	139.668.930,00	90.505.500,00	69,79	97.477.320,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.994.067,40	481.318,00	223,28	13.383.399,00
	Belanja Pembulatan Gaji	328.663,67	24.445,00	7,94	26.104,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	4.877.639.291,80	4.749.024.569,00	103,27	5.037.036.366,00
	Tunjangan Umum	75.015.000,00	46.100.000,00	61,45	49.430.000,00

	SUB JUMLAH	7.834.345.151,87	6.805.649.948,00	86,87	7.203.683.551,00
2	<i>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</i>				
	Tunjangan Lauk Pauk	386.781.340,00	264.583.200,00	68,41	319.818.700,00
	Tambahan Penghasilan Pengawai Negeri Sipil Daerah	1.249.176.393,00	1.047.250.000,00	83,84	1.104.860.000,00
	SUB JUMLAH	1.635.957.733,00	1.311.833.200,00	80,19	1.424.678.700,00
3	<i>Belanja Uang Lembur</i>				
	Belanja Uang Lembur PNS	417.100.000,00	416.339.000,00	99,82	351.177.000,00
	SUB JUMLAH	417.100.000,00	416.339.000,00	99,82	351.177.000,00
4	<i>Honorarium PNS</i>				
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.655.240.000,00	1.572.058.000,00	94,97	0,00
	SUB JUMLAH	1.655.240.000,00	1.572.058.000,00	94,97	0,00
5	<i>Honorarium Non PNS</i>				
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	956.000.000,00	868.220.000,00	90,82	0,00
	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	69.600.000,00	36.000.000,00	51,72	0,00
	SUB JUMLAH	1.025.600.000,00	904.220.000,00	88,16	0,00
	JUMLAH	12.568.242.884,87	11.010.100.148,00	87,60	8.979.539.251,00

1. 1. 2 Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2015 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
	<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>				
	Belanja Alat Tulis Kantor	203.250.000,00	191.822.600,00	94,38	219.993.500,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	9.880.000,00

	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.501.000,00	4.200.000,00	64,61	7.750.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	14.642.500,00	97,62	17.560.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	117.600.000,00	104.833.800,00	89,14	115.409.800,00
	SUB JUMLAH	347.351.000,00	320.098.900,00	92,15	370.593.300,00
	<i>Belanja Bahan/Material</i>				
	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.000.000,00	43.837.000,00	99,63	19.950.300,00
	Belanja Umbul-umbul	0,00	0,00	0,00	-
	SUB JUMLAH	44.000.000,00	43.837.000,00	99,63	19.950.300,00
	<i>Belanja Jasa Kantor</i>				
	Belanja Telepon	20.000.000,00	17.932.010,00	89,66	17.907.644,00
	Belanja Air	6.000.000,00	653.500,00	10,89	-
	Belanja Listrik	97.710.000,00	72.326.000,00	74,02	70.000.000,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.000.000,00	25.367.360,00	63,42	39.995.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	660.000,00	605.000,00	91,67	550.000,00
	Belanja Sertifikasi	62.000.000,00	37.108.400,00	59,85	54.194.160,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	24.590.000,00	520.000,00	2,11	315.000,00
	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	2.000.000,00	1.400.000,00	70,00	-
	SUB JUMLAH	252.960.000,00	155.912.270,00	61,64	182.961.804,00
	<i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>				
	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	7.351.855,00	40,84	-
	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	31.407.550,00	98,15	-
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	4.637.100,00	92,74	-
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	2.034.000,00	40,68	9.734.600,00
	SUB JUMLAH	60.000.000,00	45.430.505,00	75,72	9.734.600,00
	<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>				
	Belanja Cetak	56.740.000,00	56.554.500,00	99,67	80.505.000,00
	Belanja Penggandaan	488.273.000,00	341.397.500,00	69,92	402.144.650,00
	SUB JUMLAH	545.013.000,00	397.952.000,00	73,02	482.649.650,00
	<i>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</i>				
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	800.000,00	80,00	-

	SUB JUMLAH	1.000.000,00	800.000,00	80,00	-
	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.810.000,00	96,20	-
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	33.000.000,00	30.015.000,00	90,95	42.857.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.400.000,00	49.037.000,00	79,86	54.409.500,00
	SUB JUMLAH	99.400.000,00	83.862.000,00	84,37	97.267.000,00
	<i>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</i>				
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	66.869.600,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	66.869.600,00
	<i>Belanja Pakaian Kerja</i>				
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
	<i>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</i>				
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	70.773.600,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	70.773.600,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	383.200.000,00	361.970.000,00	94,46	232.260.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.597.893.527,00	1.486.186.709,00	93,01	1.379.335.497,00
	SUB JUMLAH	1.981.093.527,00	1.848.156.709,00	93,29	1.611.595.497,00
	<i>Belanja Pemeliharaan</i>				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.861.273,00	55.889.050,00	91,83	93.664.916,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	5.000.000,00	33,33	-
	SUB JUMLAH	75.861.273,00	60.889.050,00	80,26	93.664.916,00
	<i>Belanja Jasa Konsultansi</i>				
	Belanja Jasa Keahlian Profesi	93.000.000,00	69.203.000,00	74,41	153.588.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	60.000.000,00	0,00	0,00	-
	SUB JUMLAH	153.000.000,00	69.203.000,00	45,23	153.588.000,00

	<i>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</i>				
	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	18.998.600,00
	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	58.300.000,00	77,73	45.195.000,00
	SUB JUMLAH	75.000.000,00	58.300.000,00	77,73	64.193.600,00
	<i>Belanja Honorarium PNS</i>				
	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.697.144.000,00
	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	1.705.304.000,00
	<i>Belanja Honorarium Non PNS</i>				
	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	795.730.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	795.730.000,00
	Jumlah	3.634.678.800,00	3.084.441.434,00	84,86	5.744.375.867,00

1. 1. 3. Belanja Modal

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.854.200,00	105.735.500,00	91,27	806.409.250,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	0,00	0,00	-	26.927.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.280.000,00	5.790.000,00	79,53	535.400,00
	Jumlah	123.134.200,00	111.525.500,00	90,57	833.871.650,00

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	-	203.860.000,00

	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	203.860.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	0,00	0,00		23.000.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00		23.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	0,00	-	2.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00		4.000.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	6.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00		5.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00		3.650.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	13.491.500,00	89,94	0,00
	SUB JUMLAH	15.000.000,00	13.491.500,00	89,94	8.650.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.054.400,00	44.000.000,00	97,66	252.703.900,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	-	102.603.100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.530.000,00	13.233.000,00	67,76	44.207.250,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	36.269.800,00	35.011.000,00	96,53	0,00

	SUB JUMLAH	100.854.200,00	92.244.000,00	91,46	399.514.250,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	-	54.530.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari ArsipPejabat	0,00	0,00	-	23.580.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	78.110.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	-	16.900.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	16.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Switcher/Menara Antena	0,00	0,00	-	69.475.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	69.475.000,00
	Jumlah	115.854.200,00	105.735.500,00	91,27	806.409.250,00

2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan BangunanPengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	-	7.521.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	7.521.000,00

	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	0,00	0,00	-	9.978.500,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	9.978.500,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	-	9.427.500,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	-	9.427.500,00
				-	
	JUMLAH	0,00	0,00	-	26.927.000,00

3	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	7.280.000,00	5.790.000,00	79,53	535.400,00
	Jumlah	7.280.000,00	5.790.000,00	79,53	535.400,00

1. 2. SURPLUS/DEFISIT LRA	2017	2016
Surplus/Defisit LRA Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
Pendapatan LRA	0,00	0,00
Belanja LRA	14.206.067.082,00	15.557.786.768,00
Surplus/Defisit LO	(14.206.067.082,00)	(15.557.786.768,00)

2. NERACA

Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016

2. 1. ASET

2. 1. 1. ASET LANCAR

2. 1. 1. 1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Per tanggal 31 Desember 2016 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 karena Sisa UP sebesar Rp. 104,677,929,00 sudah disetor ke Kas pada tanggal 29 Desember 2017.	0,00	0,00

2. 1. 1. 2. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Jumlah tersebut merupakan Beban atas Belanja STNK dan PKB Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017	2.774.231,00	5.555.664,00
Pajak Kendaraan Bermotor	2.599.272,00	
STNK	174.959,00	

2. 1. 1. 3. Persediaan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Per tanggal 31 Desember 2017 Persediaan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Alat Tulis Kantor	15.523.006,00	53.512.800,00

Jumlah Aset Lancar

	18.297.237,00	59.068.464,00
--	----------------------	----------------------

2. 2. ASET TETAP

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
--	------------------	------------------

Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :

1 Tanah	357.028.000,00	357.028.000,00
2 Peralatan dan Mesin	6.449.541.080,00	6.451.087.230,00
3 Gedung dan Bangunan	2.170.971.900,00	2.158.751.900,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.850.000,00	208.277.500,00
5 Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

7 Akumulasi Penyusutan	(5.390.459.593,00)	(4.335.972.504,00)
Jumlah Aset Tetap	3.795.931.387,00	4.849.172.126,00

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	SALDO AWAL 1 JANUARI 2017	MUTASI 2017		Saldo 31/12/2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	357.028.000,00	-	-	357.028.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.451.087.230,00	117.175.850,00	118.722.000,00	6.449.541.080,00
3	Gedung dan Bangunan	2.158.751.900,00	12.220.000,00	-	2.170.971.900,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.277.500,00	-	9.427.500,00	198.850.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	-	-	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(4.335.972.504,00)	76.208.333,00	(1.130.695.422,00)	(5.390.459.593,00)
JUMLAH		4.849.172.126,00	205.604.183,00	(1.002.545.922,00)	3.795.931.387,00

Penjelasan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

- Saldo Awal 01 Januari 2017	357.028.000,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	-

Saldo Akhir 31 Desember 2017	357.028.000,00
------------------------------	-----------------------

No	TANAH	SALDO AWAL 1 JANUARI 2017	MUTASI 2017		Saldo 31/12/2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	357.028.000,00	-	-	357.028.000,00
JUMLAH		357.028.000,00	-	-	357.028.000,00

2. Peralatan dan Mesin

- Saldo Awal 01 Januari 2017	6.451.087.230,00
------------------------------	------------------

- Penambahan	117.175.850,00
- Pengurangan	118.722.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2017	6.449.541.080,00

No	PERALATAN DAN MESIN	Saldo Awal 1 Januari 2017	MUTASI 2017		Saldo Akhir 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	45.203.396,00	-	-	45.203.396,00
	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	59.000.000,00	-	-	59.000.000,00
	Alat-alat Bantu Pompa	-	-	-	0,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	403.900.000,00	-	-	403.900.000,00
	Kendaraan Bermotor Penumpang	688.562.000,00	-	-	688.562.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	696.200.000,00	-	-	696.200.000,00
	Perkakas Bengkel Service	17.542.854,00	-	-	17.542.854,00
	Alat Ukur universal	63.480.000,00	-	-	63.480.000,00
	Alat Penyimpanan	-	-	-	0,00
	Mesin Tik	30.900.000,00	-	-	30.900.000,00
	Mesin Hitung/Jumlah	600.000,00	-	-	600.000,00
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	205.924.500,00	-	-	205.924.500,00
	Alat Kantor Lainnya	218.202.500,00	-	-	218.202.500,00
	Meubelair	122.801.000,00	-	-	122.801.000,00
	Alat Pengukur Waktu	-	-	-	0,00
	Alat Pembersih	32.020.000,00	-	-	32.020.000,00
	Alat Pendingin	162.670.000,00	-	-	162.670.000,00
	Alat Dapur	11.950.000,00	-	-	11.950.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	433.120.230,00	24.931.850,00	-	446.611.730,00
	Alat Pemadam Kebakaran	4.950.000,00	-	-	4.950.000,00
	Personal Komputer	1.133.026.270,00	44.000.000,00	-	1.177.026.270,00

	Peralatan Komputer Mainframe	296.285.000,00	-	-	296.285.000,00
	Peralatan Mini Komputer	111.304.600,00	-	-	111.304.600,00
	Peralatan Personal Komputer	1.139.271.730,00	13.233.000,00	118.000.000,00	1.034.504.730,00
	Peralatan Jaringan	32.044.000,00	35.011.000,00	722.000,00	66.333.000,00
	Meja Kerja Pejabat	24.579.000,00	-	-	24.579.000,00
	Meja Rapat Pejabat	20.250.000,00	-	-	20.250.000,00
	Kursi Kerja Pejabat	73.324.500,00	-	-	73.324.500,00
	Kursi Rapat Pejabat	9.750.000,00	-	-	9.750.000,00
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	54.530.000,00	-	-	54.530.000,00
	Lemari dan Arsip Pejabat	23.580.000,00	-	-	23.580.000,00
	Peralatan Studio Visual	256.724.250,00	-	-	256.724.250,00
	Alat Komunikasi Telephone	2.885.000,00	-	-	2.885.000,00
	Peralatan Pemancar VHF/FM	4.840.000,00	-	-	4.840.000,00
	Peralatan Antena VHF/FM	44.500.000,00	-	-	44.500.000,00
	Switcher/Menara Antena	27.166.400,00	-	-	27.166.400,00
	Jumlah	6.451.087.230,00	117.175.850,00	118.722.000,00	6.449.541.080,00

Keterangan

1. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Pengadaan Televisi Bidang Sekretariat pada Toko Sumber Baru sesuai nota belanja tanggal 08 Nopember 2017

8.833.000,00

Belanja Pengadaan Televisi pada Toko Sumber Baru sesuai nota belanja tanggal 08 Nopember 2017

4.658.500,00

Koreksi Ekstrakompatabel aset tetap peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya dan gedung bangunan tempat kerja lainnya pada BPKAD Tahun 2017

11.440.350,00

2. Personal Komputer

Pengadaan Personal Komputer (Belanja Laptop-Bid. Sekretariat pada CV. SIMPEL MEDIA sesuai SPB No.027/141/BPKAD/2017 tanggal 6 Nopember 2017

14.500.000,00

Pengadaan Personal Komputer (Belanja Laptop-Bid. Anggaran pada CV. SIMPEL MEDIA sesuai SPB No.027/145/BPKAD/2017 tanggal 01 Nopember 2017 29.500.000,00

3. Peralatan Personal Komputer

Belanja Pengadaan Printer, Peralatan Jaringan dan Anti Virus pada CV. Astina Putra Yudhistira sesuai SPK No:027/132/BPKAD/2017 dan BAST Barang No:027/73/BPKAD/2017 13.233.000,00

Reklas Peralatan dan Mesin berupa Printer untuk Cetak PBB ke Badan Pendapatan Daerah sesuai SK Pengelola BMD No:028/192/BPKAD tanggal 28 September 2017 118.000.000,00

4. Peralatan Jaringan

Belanja Pengadaan Printer, Peralatan Jaringan dan Anti Virus pada CV. Astina Putra Yudhistira sesuai SPK No:027/132/BPKAD/2017 dan BAST Barang No:027/73/BPKAD/2017 35.011.000,00

Penyesuaian Barang Ekstrakompatabel dari Peralatan dan Mesin-Peralatan Jaringan ke Beban Lain-lain pada BPKAD Tahun 2017 722.000,00

3 Gedung dan Bangunan

- Saldo Awal 01 Januari 2017 2.158.751.900,00
- Penambahan 12.220.000,00
- Pengurangan -

Saldo Akhir 31 Desember 2017 **2.170.971.900,00**

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2016	MUTASI 2016		Saldo 31/12/2016
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung Kantor	392.928.100,00	12.220.000,00	-	405.148.100,00
2	Bangunan Gudang	1.069.881.300,00	-	-	1.069.881.300,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	542.290.500,00	-	-	542.290.500,00
4	Rumah Negara Golongan III	153.652.000,00	-	-	153.652.000,00
	Jumlah	2.158.751.900,00	12.220.000,00	-	2.170.971.900,00

Keterangan

* **Bangunan Gedung Kantor**

Penambahan

Pengurangan

Koreksi Ekstrakompatabel aset tetap Peralatan dan Mesin-Alat Rumah Tangga Lainnya ke Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya pada BPKAD Tahun 2017	2.792.500,00
Koreksi reklas Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jaringa Transmisi ke Gedung Bangunan pada BPKAD Tahun 2017	9.427.500,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Saldo Awal 01 Januari 2017	208.277.500,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	9.427.500,00
Saldo Akhir 31 Desember 2017	217.705.000,00

No	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2016	MUTASI 2016		Saldo 31/12/2016
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Waduk Irigasi	198.850.000,00	-	-	198.850.000,00
2	Jaringan Transmisi	9.427.500,00	-	9.427.500,00	0,00
	Jumlah	208.277.500,00	-	9.427.500,00	198.850.000,00

Keterangan	Penambahan	Pengurangan
* Koreksi Reklas Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan Transmisi ke Gedung Bangunan pada BPKAD Tahun 2017		94.275.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

- Saldo Awal 01 Januari 2017	10.000.000,00
- Penambahan	267.700,00
- Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017	10.267.700,00

No	ASET TETAP LAINNYA	SALDO AWAL 31/12/2016	MUTASI 2016		SALDO AKHIR 31/12/2016
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00

	Jumlah	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
--	---------------	----------------------	---	---	----------------------

6. Akumulasi Penyusutan

- Saldo Awal 01 Januari 2017	(4.335.972.504,00)
- Penambahan	76.208.333,00
- Pengurangan	(1.130.695.422,00)

Saldo Akhir 31 Desember 2017	(5.390.459.593,00)
------------------------------	---------------------------

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 31/12/2017	SALDO AKHIR 31/12/2016
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	(59.000.000,00)	(59.000.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.108.490.472,00)	(868.036.185,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(47.755.000,00)	(37.115.333,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(404.348.501,00)	(351.093.024,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(684.845.445,00)	(619.605.280,00)
7	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.115.091.559,00)	(1.709.276.405,00)
8	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(148.522.416,00)	(124.145.116,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(200.469.723,00)	(165.215.646,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(2.885.000,00)	(2.885.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(10.788.751,00)	(3.141.251,00)
12	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00

14	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(168.643.067,00)	(152.169.733,00)
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(53.568.533,00)	(45.439.531,00)
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	(198.850.000,00)	(198.850.000,00)
	Jumlah	(5.203.258.467,00)	(4.335.972.504,00)

2. 3. ASET LAINNYA		31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang masih dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah per 31 Desember 2017 berupa Aset Lain-lain.		29.440.000,00	23.650.000,00
1. Aset Tidak Berwujud			
- Saldo Awal 01 Januari 2017		5.790.000,00	
- Penambahan		-	
- Pengurangan		-	
Saldo Akhir 31 Desember 2017		5.790.000,00	
2. Aset Lain-lain			
- Saldo Awal 01 Januari 2017		23.650.000,00	
- Penambahan		-	
- Pengurangan		-	
Saldo Akhir 31 Desember 2017		23.650.000,00	
3. KEWAJIBAN			
3. 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
3. 1. 1 UTANG BEBAN		31 Desember 2017	31 Desember 2016
Utang JKK - JKM Tahun 2017 sesuai dengan surat PT. Taspen (Persero) No.SRT-36/C.1.4/012018 tanggal 24		243.967.813,00	6.345.862,00

Januari 2018 tentang kekurangan iuran program JKK-JKM bln Juli s/d Desember 2017 pada BPKAD Tahun 2017.

3. 1. 2 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		31 Desember 2017	31 Desember 2016
R/K PPKD		14.206.067.082,00	15.557.786.768,00
Jumlah Kewajiban		14.450.034.895,00	15.564.132.630,00
4. EKUITAS			
EKUITAS		31 Desember 2017	31 Desember 2016
* Aset		3.843.668.624,00	4.931.890.590,00
* Kewajiban		14.450.034.895,00	15.564.132.630,00
Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh BPKAD per 31 Desember 2017		(10.606.366.271,00)	(10.632.242.040,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.843.668.624,00	4.931.890.590,00

-

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban ditahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

2. 1. BEBAN OPERASI

Jumlah Beban Operasi untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Beban Operasi	2017	2016
1	<i>Beban Pegawai - LO</i>		
	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.613.923.820,00	1.678.673.640,00
	Beban Tunjangan Keluarga - LO	124.805.296,00	136.791.722,00
	Beban Tunjangan Jabatan - LO	180.785.000,00	190.865.000,00
	Beban Tunjangan Beras - LO	90.505.500,00	97.477.320,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	481.318,00	13.383.399,00
	Beban Pembulatan Gaji - LO	24.445,00	26.104,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	4.992.992.382,00	5.037.036.366,00
	Tunjangan Umum - LO	46.100.000,00	49.430.000,00
	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	264.583.200,00	319.818.700,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	1.047.250.000,00	1.104.860.000,00
	Beban Uang Lembur PNS - LO	416.339.000,00	351.177.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	1.572.058.000,00	0,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	868.220.000,00	0,00
	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	36.000.000,00	0,00
	Jumlah	11.254.067.961,00	8.979.539.251,00

2	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	2017	2016
	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	197.337.594,00	206.323.300,00

	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.600.000,00	9.880.000,00
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	7.750.000,00
	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.642.500,00	17.560.000,00
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	104.833.800,00	115.409.800,00
	Beban Persediaan Bahan baku Bangunan	43.837.000,00	19.950.300,00
	Beban Jasa telepon	17.932.010,00	17.907.644,00
	Beban Jasa Air	653.500,00	0,00
	Beban Jasa listrik	65.980.138,00	76.345.862,00
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	25.367.360,00	39.995.000,00
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	605.000,00	550.000,00
	Beban Jasa Sertifikasi	37.108.400,00	54.194.160,00
	Beban Jasa Transaksi Keuangan	520.000,00	315.000,00
	Beban Jasa Pendukung Kegiatan	1.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Servise	7.351.855,00	0,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	31.407.550,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.037.828,00	0,00
	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.414.705,00	5.894.158,00
	Beban Cetak	89.029.300,00	77.834.000,00
	Beban Penggandaan	341.397.500,00	402.144.650,00
	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.810.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Tamu	30.015.000,00	42.857.500,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	49.037.000,00	54.409.500,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	66.869.600,00
	Beban Pakaian kerja lapangan	0,00	19.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	70.773.600,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.970.000,00	232.260.000,00

	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.486.186.709,00	1.379.335.497,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.889.050,00	93.664.916,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Keahlian Profesi	69.203.000,00	153.588.000,00
	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	18.998.600,00
	Beban Bimbingan Teknis	58.300.000,00	45.195.000,00
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	1.697.144.000,00
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	8.160.000,00
	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	0,00	795.730.000,00
	Jumlah	3.118.866.799,00	5.730.540.087,00

3	<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	2017	2016
	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	0,00	7.023.810,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	240.454.287,00	249.909.999,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur	10.639.667,00	10.821.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor	53.255.477,00	65.693.402,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	65.240.165,00	74.696.700,00
	Beban Penyusutan Komputer	405.815.154,00	482.873.030,00
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.377.300,00	24.777.300,00
	Beban Penyusutan Alat Studio	35.254.077,00	35.484.592,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	46.167,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	7.647.500,00	1.857.917,00
	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00

	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.473.334,00	16.473.334,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.129.002,00	8.129.002,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	8.285.417,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	6.250.000,00
	Jumlah	867.285.963,00	992.321.670,00

4	<i>Beban Lain-lain</i>	2017	2016
	Beban Lain-lain	722.000,00	21.168.400,00
	Jumlah	722.000,00	21.168.400,00
	<i>Total Beban</i>	<i>15.240.942.723,00</i>	<i>15.723.569.408,00</i>

Beban Lain-lain merupakan Barang Ekstrakompabel dari Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan ke Beban Lain-lain

2. 3.	KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	2017	2016
	Defisit Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Printer)	-	2.572.916,00

2. 4.	SURPLUS/DEFISIT LO	2017	
	Surplus/Defisit LO Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
	Pendapatan LO	0,00	0,00
	Beban LO	15.240.942.723,00	15.723.569.408,00
	Penghapusan Aset lainnya	0,00	2.572.916,00
	Surplus/Defisit LO	(15.240.942.723,00)	(15.726.142.324,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 sebesar **Rp. 3.890.669.087,00**

Uraian	LPE	
	2017	2016
EKUITAS AWAL	4.925.544.728,00	4.720.411.412,00
Surplus/Defisit LO	(15.240.942.723,00)	(15.726.142.324,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	373.488.872,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	14.206.067.082,00	15.557.786.768,00
EKUITAS AKHIR	3.890.669.087,00	4.925.544.728,00